

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Bagir, M. *Menyongsong Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2002.
- Bivitri, Susanti. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: PSHK Press, 2010.
- Eko, Sutoro. *Regulasi Baru Desa Baru*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, 2015.
- Eko, Sutoro. "Meletakkan Desa dalam Desentralisasi dan Demokrasi." In *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, edited by Andi Gani Karim, 257–260. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Farida, Maria Indrati. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Huda, Ni'matul. *Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2024.
- Kertohadikusuma, Soewargana. *Desa*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. 10th ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Maria, Sumardjono. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2021.
- Mashuri, Masnun. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Politik dan Pemerintahan (PolGov), Fisipol UGM, 2013.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Yogyakarta: EA Books, 2022.
- Mulyadi, Lilik. *Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Kusumaatmadja, S.H., LL.M.: Sebuah Kajian Deskriptif Analitis*. [Tempat terbit tidak disebutkan], n.d.
- Perwira, Indra. *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Politik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

- Ridwan, H.R., Yulianto Netta, and Indra Satriawan. *Ilmu Negara: Dasar-Dasar Teori Bernegara*. Lampung: PKK-PUU Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2013.
- Soemantri, Soemantri. *Sistem-Sistem Pemerintahan Negara-Negara ASEAN*. Bandung: Tarsito, n.d.
- Soetandyo, Wignjosuebrototo. *Hukum: Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press, 2013.
- Soetadjo, K. *Desa*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Sumardjono, Maria S.W. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2021.
- Widjaja, H.A.W. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Wiratraman, Herlambang P. *Hukum dan Kritik Publik*. Yogyakarta: LKiS, 2014.
- Wicaksono, Awasi. *Perda: Berdayakan Daerah — Seri Panduan Pemantauan Legislasi Daerah*. Jakarta, 2010.
- Zayanti, Mery. *Politik Hukum Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2015.

### **Jurnal Ilmiah**

- Amsari, Feri. “Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang: Evaluasi terhadap Prosedur Legislasi di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 440.
- Anggoro, Satrio Arismunandar. “Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 1 (2019): 79.
- Arinanto, Satya. “Negara Hukum yang Demokratis dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 2 (2011): 132.
- Dian, Hendra. “Urgensi Revisi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Perihal Pembangunan Desa.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 248–252.
- Herdiana, Dadan. “Urgensi Revisi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 248–252.

Iwan, Syafruddin. “Politik Hukum Pemerintahan Desa.” *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2013): 150–152.

Santoso, Purwo, ed. *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Satriawan, Iwan. “Politik Hukum Pemerintahan Desa.” *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2013): 150–152.

### **Tesis / Disertasi**

Ayubi, Zulfa. “Politik Hukum Rancangan Perubahan Undang-Undang tentang Desa Mengenai Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Sadd al-Dzari’ah.” Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2024.

Mandasari, Zulfika. “Politik Hukum Pemerintahan Desa (Studi Perkembangan Pemerintahan Desa di Masa Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi).” Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2015.

Muddatsir, Ahmad. “Politik Hukum Hubungan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.” Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2024.

Rahman, Andi. “Hakikat Pembentukan Peraturan Desa pada Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.” Disertasi, Universitas Hasanuddin, n.d.

Zafarurriqon, Ahmad. “Politik Hukum Rancangan Perubahan Undang-Undang tentang Desa Mengenai Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Sadd al-Dzari’ah.” Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, n.d.

### **Peraturan dan Risalah Rapat**

Indonesia. *Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

Indonesia. *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa dan Kriteria Tata Kelola Keuangan Desa*.

Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Tahun Anggaran 2025*.

Indonesia. *Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi RI*, 30 September 2021.

## Sumber Daring, Media, dan Video

Antikorupsi.org. “Sesat Pikir Perpanjangan Masa Jabatan Kades: Niat Buruk Politisasi Desa dan Suburkan Oligarki Desa.” Terbit 9 November 2024. <https://antikorupsi.org/id/sesat-pikir-perpanjangan-masa-jabatan-kades-niat-buruk-politisasi-des-a-dan-suburkan-oligarki-des-a>

Atmaja, Wijaya. “Menghidupkan Demokrasi: Menyelamatkan Desa dari Dinasti.” *Lombok Post*, 22 Februari 2025.

Kompas.id. “Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Sarat Kepentingan Politik.” Terbit 23 Januari 2023. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/23/perpanjangan-masa-jabatan-kepala-des-a-sarat-kepentingan-politik>

Kompaspedia. “Undang-Undang Desa: Sejarah, Otonomi, dan Makna Desa.” Terbit 21 November 2024. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/undang-undang-des-a-sejarah-otonomi-dan-makna-des-a>

Koran Tempo. “Bagaimana Revisi UU Desa Disahkan.” *Koran Tempo*, 18 Oktober 2024. <https://koran.tempo.co/read/nasional/487140/bagaimana-revisi-uu-des-a-disahkan>

Malian, Satria. “Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa: Maslahat atau Mudarat?” *Universitas Ahmad Dahlan News*, 2024. <https://news.uad.ac.id/perpanjangan-masa-jabatan-kepala-des-a-manfaat-atau-mudarat>

Mochtar, Zainal Arifin. “KUHP dan Lemahnya Politik Hukum Negara.” *Media Indonesia*, 2022. <https://mediaindonesia.com/kolom-pakar/543796/kuhp-dan-lemahnya-politik-hukum-negara>

Suharso, Satria. “Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa: Maslahat atau Mudarat?” *Universitas Ahmad Dahlan News*, 2024. <https://news.uad.ac.id/perpanjangan-masa-jabatan-kepala-des-a-manfaat-atau-mudarat>

Tempo.co. “Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024.” Terbit 19 Januari 2024. <https://www.tempo.co/politik/perjalanan-ubah-regulasi-masa-jabatan-kepala-des-a-di-uu-des-a-setelah-unjuk-rasa-menjelang-pemilu-2024-62317>

Setkab.go.id. “Kemendes PD TT Wujudkan Pembangunan Nasional Berkelanjutan Lewat SDGs Desa.” Terbit 2024. <https://setkab.go.id/kemendes-pdtt-wujudkan-pembangunan-nasional-berkelanjutan-lewat-sdgs-des-a>

YouTube. “Sosialisasi Perubahan UU Desa No. 3 Tahun 2024.” 2024.  
<https://www.youtube.com/watch?v=SHemP4ZD-mE>